



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1  
TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI  
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**YUNIA NURISMAN**  
**NIM : 11721200621**

**PROGRAM S1  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
(AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1442 H / 2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Tahapan Pramediasi Dalam Pemeriksaan Perkara Perceraian*”, yang ditulis oleh :

Nama : Yunia Nurisman  
 NIM : 11721200621  
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-syakhsiyyah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,           Rajab 1442 H            
 15 Maret 2021 M

Pembimbing Skripsi,

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN**”, yang ditulis oleh:

Nama : **YUNIA NURISMAN**  
 NIM : 11721200621  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/ tanggal : Kamis, 15 April 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Nurnasrina, SE., M.Si.**

Sekretaris  
**Musrifah, SH., MH.**

Penguji I  
**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH.**

Penguji II  
**Dr. Mahmuzar, M.Hum.**

*[Signature]*  
 .....

*[Signature]*  
 .....

*[Signature]*  
 .....



Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.**

NIP. 19580712 198603 1 005





## ABSTRAK

**Yunia Nurisman (2021): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Tahapan Pramediasi Dalam Pemeriksaan Perkara Perceraian.**

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya peraturan mahkamah agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 pasal 17 mengenai tahapan pramediasi dalam pemeriksaan perkara perceraian. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana tahapan pramediasi menurut pasal 17 peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 1 tahun 2016 dalam pemeriksaan perkara perceraian dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pasal 17 peraturan mahkamah agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 mengenai tahapan pramediasi dalam pemeriksaan perkara perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana tahapan pramediasi menurut Pasal 17 peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 1 tahun 2016 mengenai tahapan pramediasi dalam pemeriksaan perkara dan untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pasal 17 peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 1 tahun 2016 mengenai tahapan pramediasi dalam pemeriksaan perkara perceraian.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Islam normatif atau sering disebut dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dengan metode kualitatif melalui pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan. Selanjutnya data yang ada di kumpulkan, diolah dan penulis memaparkan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pasal 17 peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 1 tahun 2016 mengenai tahapan pramediasi, kemudian data diperoleh dan dianalisis dengan teori-teori yang bersumber dari buku-buku dan literature yang berkaitan dengan persoalan ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mengenai tahapan pramediasi pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dilakukannya mediasi berdasarkan PERMA ini dapat diperoleh: Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari kerja terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau didampingi kuasa hukum, terkecuali ada alasan-alasan yang sah. Ketiga, yang paling baru adalah adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Sejak berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008 dan diganti dengan PERMA No.1 Tahun 2016 konsep hakam yang diatur dalam Al-Qur'an menjadi hilang dan diganti oleh seorang mediator yang diambil bukan dari pihak suami dan istri melainkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang hakim atau mediator dari luar yang sudah tersertifikat. Pada dasarnya pengangkatan mediator dari pihak luar disebabkan kondisi di pengadilan, bukan bertujuan menghilangkan ketentuan hukum yang dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 35 dan juga tujuan dari maqashidus syariah yaitu menekankan pada kepentingan umum dengan mempertimbangkan unsur-unsur darurat dan kondisi.

**Kata Kunci : Mahkamah Agung, Mediasi, Hukum Islam.**





## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *Syayidul Mustofa* baginda kita Rasulullah Muhammad saw. Semoga syafaat beliau dapat kita rasakan di Yaumul Akhir nanti, Aamiin.

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan kaum muslimin pada umumnya, terutama pada diri penulis sendiri. Semoga dengan tersusunnya skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Tahapan Pramediasi Dalam Pemeriksaan Perkara Perceraian”** ini, tidak hanya menambah khazanah keilmuan, namun segala kebaikan yang terdapat didalamnya juga dapat kita amalkan hendaknya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal hanya dari Allah SWT. Tetapi, jika di dalam skripsi ini terdapat kesalahan, maka datanganya dari diri penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapakan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dimasa yang akan datang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak baik moril maupun materil. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua kandung penulis, Almarhum Ayahanda tercinta Tasman AR bin Amai Yuli dan Almarhumah Ibunda tercinta Nursida binti Juri yang telah melahirkan dan merawat serta selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis yang jasanya tidak akan pernah bisa terbalaskan oleh diri penulis. Dan terimakasih untuk Mama Musirni, Ibu Hamidah Huri dan Ayah Harsad yang selalu mengsupport dan mendoakan penulis serta kedua abang kandung penulis yaitu Muhamdika Tasman, S.Pd dan Fajrul Ihksan yang telah merawat serta memberikan yang terbaik untuk penulis, dan untuk kakak-kakak penulis Mayaserly Eka Putri,SP dan Febry Fadiyah Utami serta adik-adik penulis Hanif Fakhri Harsad dan Ghalin Khairiyah dan seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Suyitno, M.Ag, selaku Plt.Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CI, Wakil Dekan II Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. Maghfirah, MA.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsyiyah) dan Bapak Ade Fariz



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakhrullah, M.Ag, sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsyiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA, selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
7. Para bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas belajar berupa buku-buku rujukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2017 dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
10. Sahabat-sahabat penulis dan orang-orang terdekat penulis yang selalu memberi motivasi dan support serta doa yang terbaik untuk penulis yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, semoga Allah memberkahi kawan-kawan semua.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga mendapat imbalan yang lebih dari apa yang telah diberikan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi usaha Penulis, Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, Februari 2021  
Penulis

**YUNIA NURISMAN**  
**NIM : 11721200621**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II      MAHKAMAH AGUNG, KEWENANGAN DAN LATAR BELAKANG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016</b>	
A. Mahkamah Agung.....	13
1. Pengertian Mahkamah Agung.....	13
2. Sejarah Singkat berdirinya Mahkamah Agung .....	15
3. Struktur Organisasi Mahkamah Agung .....	18
4. Kewenangan Mahkamah Agung.....	19
B. Latar Belakang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan Pramediasi.....	23
<b>BAB III      TINJAUAN TEORITIS MEDIASI DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Mediasi .....	27
B. Dasar Hukum Mediasi .....	29
C. Syarat-syarat Mediasi .....	34
D. Mediasi Menurut Islam.....	39

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN

A. Analisis Tahapan Pramediasi Menurut Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Pemeriksaan Perkara Perceraian .....	45
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan Pramediasi Dalam Pemeriksaan Perkara Perceraian .....	56

## BAB V

### PENUTUP

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61

## DAFTAR PUSTAKA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis dari pada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di Pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*Face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya Timur, termasuk Indonesia.<sup>1</sup>

Indonesia adalah Negara hukum, Indonesia sejak diproklamirkan telah menganut paham Negara hukum demokratis, spirit Negara hukum demokratis itu salah satunya terdapat dalam pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Tujuan itu tidak lain harus direalisasikan dalam bentuk penciptaan kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan hak-hak sembari mematangkan demokrasi sekaligus merawat konstitusi.<sup>2</sup> Dalam Negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*) Negara hukum

<sup>1</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 4; dikutip dari Jhon S. K Ng, *The Four Face of Face: Implication for Medication*, dalam *An Asian Perspective on Mediation*, eds Lee J. And Hwee, T. H., Academy Publishing (Singapore: 2009), hlm. 158-159.

<sup>2</sup> Luqman Santoso AZ, *Negara Hukum dan Demokrasi : Paag Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta : Nadi Offset, 2016), hlm.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

haus menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.<sup>3</sup>

Mediasi sangat sulit diberi pengertian, dimensinya sangat jamak dan tak terbatas. Sehingga banyak orang yang menyebutkan mediasi tidak mudah diberi definisi. “*Mediation is not easy to definite*”. Hal ini karena mediasi tidak memberi satu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya. Mediasi sangat tergantung pada lakon yang dimainkan oleh pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah. Pihak yang terlibat adalah pihak mediator dan pihak yang tersangkut dalam sengketa.<sup>4</sup>

Dalam pasal 17 ayat 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak, sebagaimana penjelasan yang dimaksud pada ayat 6 hakim mediator menjelaskan mediasi dan manfaat mediasi.

Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak. Seorang mediator hanya berupaya mendorong para pihak untuk terbuka, bernegosiasi, dan mencari solusi terbaik.<sup>5</sup>

Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pengertian mediasi secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediare*” yang berarti ditengah atau yang berada ditengah, karena orang

<sup>3</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Wali Press, 2014), hlm.21

<sup>4</sup> Moehhammad Moein, *Kedudukan Kuasa dan Peran Hakim Dalam Memberi Putusan* (Penelitian, Pusat Penelitian IAIN Ar – Raniry Darusslam Tahun 1985), hlm. 72

<sup>5</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm.10

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah orang yang bertikai.<sup>6</sup>

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*<sup>7</sup>

Hukum itu sifatnya represip dia menekan atau memaksa, ihtizam atau munzim dalam bahasa Arab. Pertama, hukum itu dianggap memberi penekanan atau pemaksaan dengan kaedah-kaedahnya atau pasal-pasal nya. Kedua, bagaimana penekanannya serta sejauh apa penekanannya terhadap masyarakat Indonesia dari segi pasal nya dan dari segi sanksi-sanksinya. Hukum itu restitutip (memperbaiki) hukum itu al-islah dia memperbaiki kehidupan sosial.

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusnya perpecahan silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Memberi maaf adalah perbuatan yang sangat dihargai dalam Islam, karena dapat menyadarkan orang akan kekeliruannya.<sup>8</sup>

Dalam Islam telah diatur mengenai ketentuan dan tata cara perdamaian. Seperti tentang mediator yang dalam Islam disebut hakim, yaitu

<sup>6</sup> Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 10

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2003), hlm. 97

<sup>8</sup> Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 142

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa, yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu majelis hakim dapat mengangkat hakim yang bukan dari pihak keluarga para pihak. Diantaranya yang berasal dari hakim mediator yang sudah ditetapkan oleh lembaga tahkim.<sup>9</sup>

Sebagai kasih sayang Allah SWT terhadap umat manusia, Allah SWT menurunkan pedoman dan aturan hidup yang perlu dijadikan acuan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini agar manusia meraih kesuksesan, keselamatan dan kejayaan hidup didunia dan akhirat. Pedoman dan aturan tersebut itulah yang dikenal dengan hukum Allah SWT atau hukum Islam. Ulama telah berkonsensus bahwa tujuan umum pensyari'atan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia yaitu memelihara agama, akal, harta, jiwa dan keturunan. Kelima hal ini merupakan kebutuhan pokok/primer yang menjadi tegaknya kehidupan manusia.

Dengan terjamin dan terpeliharanya kelima hal diatas, akan terwujudlah kemaslahatan lahir dan batin, individu dan masyarakat, dunia dan akhirat. Itulah yang dalam bahasa Al-Quran disebut hasanah fid-dunya dan hasanah fil-akhirat. Kelima hal tersebut dikenal dengan al-daruriyyat al-khams (lima kebutuhan primer kehidupan manusia). Kelima hal ini antara yang satu dengan yang lain saling terkait.<sup>10</sup>

Menurut M. Quraish Shihab bahwa Ishlah jangan dipahami dalam arti mendamaikan antara dua orang (atau lebih) yang berselisih. Akan tetapi, kata

<sup>9</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), hlm.12

<sup>10</sup> Muhammad sa'ad al-Yubi, *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyah*, hlm.182

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tersebut harus dipahami sesuai dengan makna semantiknya dengan memperhatikan penggunaan al-Qur'an terhadapnya. Menurutnya ada dua bentuk yang digunakan al-Qur'an: Pertama Ishlah merupakan satu bentuk kata yang selalu membutuhkan obyek, dan Kedua ishlah yang digunakan dalam bentuk kata sifat. Sehingga ishlah dapat diartikan sebagai terhimpunnya sejumlah nilai tertentu pada sesuatu, sehingga ia dapat bermanfaat (berfungsi) dengan baik sesuai dengan tujuan kehadirannya. Apabila pada sesuatu ada satu nilai yang tidak menyertainya sehingga tujuan dimaksud tidak tercapai, maka manusia dituntut untuk menghadirkan nilai tersebut padanya, dan apa yang dilakukannya dinamai Ishlah.<sup>11</sup>

Menurut Syahrial Abbas penjelasan mediasi jika dilihat dari segi kebahasaan lebih menitik beratkan pada pihak ketiga sebagai fasilitator para pihak bersengketa untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Penjelasan ini sangat penting untuk membedakan bentuk-bentuk alternative penyelesaian sengketa lainnya.<sup>12</sup>

Konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun, berbagai kajian menunjukkan bahwa konflik tidak selalu berakibat buruk. Konflik dapat mendorong dinamika dalam institusi atau organisasi, meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, menumbuhkan sikap toleran, meningkatnya kualitas hubungan, kematangan psikologis

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 1994), hlm.360

<sup>12</sup> Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.3

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang, hingga terciptanya keharmonisan. Meskipun demikian masyarakat cenderung menilai konflik sebagai bentuk permusuhan, tindakan agresif, penuh kekerasan dan membuat hubungan tidak berjalan dengan baik.<sup>13</sup>

Dalam pelaksanaan mediasi ada beberapa hal yang memberikan dampak pada para pihak yang berperkara. Banyak yang menyatakan bahwa ketika seseorang telah mengajukan gugatan atau permohonan yang ada lawan ke Pengadilan itu sudah merupakan keputusan akhir dan tidak ada titik temu dalam permasalahan tersebut kecuali melalui meja Pengadilan.

Berdasarkan uraian konteks penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 MENGENAI TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN”**.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi isi penelitian hanya sebatas Tahapan Pramediasi dalam Pemeriksaan Perkara Pasal 17 Peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

---

<sup>13</sup> Septi Wulan Sari, *Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, volume 5 Nomor 1, Juli 2017*, hlm 1, di akses tanggal 16 oktober 2020 pada pukul 22:04

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tahapan Pramediasi Menurut Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Pemeriksaan Perkara Perceraian?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan Pramediasi Dalam Pemeriksaan Perkara?

### D. Tujuan dan Mnfaat Peneltian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui tahapan pramediasi menurut Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan Pramediasi Dalam Pemeriksaan Perkara.
  - b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan Pramediasi dalam Pemeriksaan Perkara Perceraian.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Tahapan Pramediasi dalam Pemeriksaan Perkara Perceraian menurut Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 agar mediasi berjalan dengan sebagaimana mestinya.

- b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data itu,<sup>14</sup> maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library research* menurut Sutrisno Hadi adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni<sup>15</sup>. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti Kitab, buku, majalah, dan lain-lain.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2002), hlm.194

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981), hlm.9

## 2. Objek Penelitian

Objek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan Pramediasi Pemeriksaan Perkara Perceraian.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah data kepustakaan atau data skunder<sup>16</sup>, didalam kepustakaan hukum. Adapun sumber data disini menggunakan bahan hukum yang dibagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang dibagi bersifat otoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan keputusan hakim.<sup>17</sup> Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat atau mempunyai hubungan langsung dengan yang diteliti, pada penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 17 Nomor 1 Tahun 2016 Tentang tahapan Pramediasi Pemeriksaan Perkara Perceraian.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi

<sup>16</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. Ke-1, hlm.119

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm.141



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>18</sup> Adapun bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai baham data hukum primer, pada penelitian ini seperti Undang-Undang, kitab-kitab fiqih, buku-buku, jurnal-jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum primer.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum ilmiah dan ensiklopedi.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumentar, yaitu dikumpulkan dari telah arsip atau studi pustaka seperti, peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, artikel, jurnal, majalah atau karya-karya pakar.

### 5. Teknik Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis mediasi dalam pemeriksaan perkara perceraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang akurat, teratur, dan tersusun rapi dalam bentuk tulisan sebagaimana yang diharapkan penulis.

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm.141

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Teknik Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### a. Deduktif

Metode deduktif adalah uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan-kesimpulan secara khusus.

### b. Deskriptif

Metode Deskriptif yaitu suatu urutan penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan-keadaannya.<sup>19</sup>

## F. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II MAHKAMAH AGUNG, KEWENANGAN DAN LATAR BELAKANG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.108

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini memuat tentang Mahkamah Agung yang meliputi tentang pengertian Mahkamah Agung, sejarah singkat berdirinya Mahkamah Agung, struktur Organisasi Mahkamah Agung, kewenangan Mahkamah Agung, dan latar belakang Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan Pramediasi.

### **BAB III TINJAUAN TEORITIS MEDIASI DALAM HUKUM ISLAM**

Pada bab ini membahas tentang pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, syarat-syarat mediasi, dan pendapat ulama mengenai mediasi.

### **BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN**

Pada bab ini membahas tentang bagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang tahapan pramediasi pemeriksaan perkara perceraian dan bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang tahapan pramediasi dalam pemeriksaan perkara perceraian.

### **BAB V PENUTUP**

Merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### MAHKAMAH AGUNG, KEWENANGAN DAN LATAR BELAKANG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016

#### A. Mahkamah Agung

##### 1. Pengertian Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.<sup>20</sup> Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua, ketua Mahkamah Agung dipilih dari hakim karier dan Non karier, professional atau akademisi. Mahkamah Agung memiliki hakim agung sebanyak 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari system karier (hakim), atau tidak berdasarkan system karier dari kalangan profesi atau akademisi. Tugas Hakim Agung adalah Mengadili dan memutus perkara pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

Menurut Undang-undang No.14 Tahun 1970 Bab III. Pasal 26 ayat (1) dikatakan :<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Pasal 24A angka (1) Undang-undang Dasar 1945.

<sup>21</sup> Soesolo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), hlm.287



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Mahkamah Agung adalah lembaga Tinggi kehakiman atau pengadilan Negara Tertinggi bagi seluruh daerah atau wilayah di Indonesia, berkedudukan di Ibukota Negara R.I ialah di Jakarta. Berfungsi mengawasi tindakan-tindakan pengadilan yang ada di bawah kekuasaannya adalah: Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Putusan tentang tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundangan dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.”<sup>22</sup>

Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>23</sup>

Melihat peran Mahkamah Agung dan tugas serta tanggungjawabnya yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia. Perannya dapat menjadi kekuatan bagi

<sup>22</sup> Soesolo Prajogo, *Ibid*, hlm.287

<sup>23</sup> A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung, cet I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm.203

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan keadilan dalam penegakkan hukum. Mahkamah Agung dapat memeriksa dan dapat memberikan sanksi kode etik kepada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim, misalnya terhadap proses peradilan yang diindikasikan sarat dengan muatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).<sup>24</sup>

## 2. Sejarah Singkat berdirinya Mahkamah Agung

Pada tahun 1809 Pemerintahan Belanda membangun sebuah Istana yang menghadap lapangan parade Waterlooplein (Sekarang Lapangan Banteng). Selesai pada masa Gubernur Jendral Du Bus pada tahun 1825. Pelaksananya adalah ir.Tramp.Istana Waltvreden ini digunakan untuk tugas sehari-hari para Gubernur Jendral.Pada tanggal 1 Mei 1848 sebagian bangunan digunakan untuk Departemen Van Justitie (Mahkamah Agung).<sup>25</sup>

Pada saat berlakunya Undang-undang Dasar 1945 di Indonesia tidak ada badan Kehakiman yang tertinggi. Satu-satunya ketentuan yang menunjuk kearah badan Kehakiman yang tertinggi adalah pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945. Maka dengan keluarnya Penetapan Pemerintah No.9/S.D tahun 1946 ditunjuk kota Jakarta Raya sebagai kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan tersebut

<sup>24</sup> Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), hlm. 14

<sup>25</sup> Mahkamah Agung, *Profil Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI), hlm.9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya penunjukan tempatnya saja. Penetapan Pemerintah tersebut pada alinea II berbunyi sebagai berikut :<sup>26</sup>

Menunjukkan sebagai tempat kedudukan Mahkamah Agung tersebut ibu-kota DJAKARTA-RAJA. Baru dengan Undang-undang No.7 tahun 1947 ditetapkan tentang susunan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 1947. Pada tahun 1948, Undang-undang No.7 tahun 1947 diganti dengan Undang-undang No.19 tahun 1948 yang dalam pasal 50 ayat 1 menyatakan Mahkamah Agung Indonesia ialah pengadilan federal tertinggi. Pengadilan-pengadilan federal yang lain dapat diadakan dengan Undang-undang federal, dengan pengertian bahwa dalam Distrik Federal Jakarta akan dibentuk sekurang-kurangnya satu pengadilan federal yang mengadili dalam tingkat pertama, dan sekurang-kurangnya satu pengadilan federal yang mengadili dalam tingkat apel.

Oleh karena itu kita telah kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dan tidak sesuai dengan keadaan, maka pada tahun 1965 dibuat Undang-undang yang mencabut Undang-undang No.19 tahun 1948 dan No.1 tahun 1950 dengan Undang-undang nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

### **Masa Republik Indonesia**

Di zaman pendudukan jepang pernah Badan Kehakiman tertinggi dihapuskan (Saikoo Hooiin) pada tahun 1944 dengan Undang-Undang

---

<sup>26</sup> Mahkamah Agung, *Ibid*, hlm.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Osamu Seirei) No.2 tahun 1944, yang melimpahkan segala tugasnya yaitu kekuasaan melakukan pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan kepada Kooto Hooiin (Pengadilan Tinggi).

Meskipun demikian kekuasaan kehakiman tidak pernah mengalami kekosongan. Namun sejak Proklamasi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dari sejak di undangkannya Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 tanggal 18 Agustus 1945, semakin mantaplah kedudukan Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi bidang Yudikatif (peradilan) dengan kewenangan yang diberikan oleh pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, dimana Mahkamah Agung diberi kepercayaan sebagai pemegang kekuasaan Kehakiman tertinggi.

Mahkamah Agung pernah berkedudukan diluar Jakarta yaitu pada bulan juli 1946 di Jogjakarta dan kembali ke Jakarta pada tanggal 1 januari 1950, setelah selesainya Konferensi Meja Bundar dan pemulihan Kedaulatan. Dengan demikian Mahkamah Agung berada dalam pengungsian selama tiga setengah tahun.

Mulai pertama kali berdirinya Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung itu berada dibawah satu atap dengan Mahkamah Agung, bahkan bersama dibawah satu departemen, yaitu departemen Kehakiman. Dulu namanya Kehakiman Agung pada Mahkamah Agung, seperti kejaksaan Negeri dulu namanya Kejaksaan pengadilan Negeri.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Mahkamah agung, *Ibid*, hlm.11-12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kejaksaan Agung mulai memisahkan diri dari Mahkamah Agung yaitu sejak lahirnya Undang-undang Pokok Kejaksaan (Undang-undang No.15 tahun 1961) dibawah Jaksa Agung Gunawan, SH yang telah menjadi Menteri Jaksa Agung.<sup>28</sup>

### 3. Struktur Organisasi Mahkamah Agung

Susunan Keanggotaan sebagaimana telah diatur pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang mana telah diubah pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan secara khususnya pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana menjelaskan tentang susunan Mahkamah Agung terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Seorang Sekretaris. Adapun jumlah hakim agung paling banyak enam puluh orang.

Mengenai susunan pimpinan Mahkamah Agung dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Ketua Mahkamah Agung (KA MA)

Menurut pasal 5 ayat 1 UU MA, bahwa salah satu pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang Ketua yang akan menjabat dan bertindak sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (KAMARI).

---

<sup>28</sup> Mahkamah Agung, *Ibid*, hlm.12

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dua orang Wakil Ketua MA ( WAKA MA)

Menurut pasal 5 ayat 1 UU MA, wakil ketua Mahkamah Agung (WAKA MA) terdiri atas :

- 1) 2 (dua orang)
- 2) Serta menurut pasal 5 ayat 2 masing-masing WAKA MA tersebut membidangi;

I. WAKA MA Bidang Yudisial

Berdasarkan pasal 5 ayat 3 UU MA, WAKA MA bidang yudisial membawahi:

- a. Ketua Muda Perdata (TUADA DATA)
- b. Ketua Muda Pidana (TUADA PID)
- c. Ketua Muda Agama (TUADA AG)
- d. Ketua Muda Militer (TUADA MIL)
- e. Ketua Muda Tata Usaha Negara (TUADA TUN)

II. WAKA MA Bidang NonYudisial

Menurut pasal 5 ayat 4 UU MA, WAKA MA bidang yudisial :

- a. Ketua Muda Pembinaan
- b. Ketua Muda Pengawasan<sup>29</sup>

**4. Kewenangan Mahkamah Agung**

Salah satu kewenangan yang diberikan Konstitusi Kepada Mahkamah Agung sebagai pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, menguji peraturan perundang-undangan. Secara populer disebut Hak Uji Materil

<sup>29</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.211

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau *Judical Review*. Tujuan utama pemberian kewenangan hak menguji peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, untuk mempertegas dan memperkuat peran dan tugasnya agar mampu melakukan pengawasan terhadap semua tindak tanduk pemerintah atau penguasa (*to enable the judge to exercise control of the government's action*).<sup>30</sup>

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah: 1) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. 2) Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. 3) Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.<sup>31</sup>

Mahkamah Agung salah satu kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan kewenangan antara lain :<sup>32</sup>

1. Memeriksa dan memutus; permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.
3. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

<sup>30</sup> Harahap M.Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kembali dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.94

<sup>31</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24A., dalam Redaksi Interaksara, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat, (Tangerang: Interaksara), hlm. 37

<sup>32</sup> Titik Triwulan Tutik, *loc.cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
5. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
6. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
7. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap para hakim disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
8. Memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan.
9. Memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:
  - a. Antara pengadilan lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain.
  - b. Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berkaitan dari lingkungan peradilan yang sama.
  - c. Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan pengadilan yang berlainan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.
11. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
12. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dan permohonan grasi dan rehabilitasi.
13. Melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris bersama-sama presiden.
14. Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain.
15. Meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
16. Memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir dari KPUD tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi.

## **B. Latar Belakang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Tahapan Pramediasi**

Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai telah dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari zaman dahulu. Sebagai Negara yang berideologikan Pancasila tentu memiliki keterkaitan satu sama lain. Dimana sila keempat menyatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masyarakat Indonesia menyelesaikan masalahnya berdasarkan musyawarah mufakat seperti pengambilan keputusan. Hal ini menjadikan landasan filosofis adanya lembaga damai. Nilai tertinggi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan dibawahnya. Musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan pihak yang bersengketa dalam mencari solusi terutama di jalur pengadilan. Bentuk-bentuk musyawarah mufakat yang lebih modern dikembangkan dan dikenal istilah-istilah seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, dan lain sebagainya yang memiliki makna sama dengan istilah di atas.<sup>33</sup>

Landasan hukum mediasi pertama ialah HIR (*Het Herzeine Indonesiach Reglment*) Pasal 130 yang mengatakan bahwa:

(1) Jika pada hari yang telah ditentukan itu kedua belah pihak datang maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka.

<sup>33</sup> Dede Anggraini Elda, *Efektifitas PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang*, (UIN Raden Fatah Palembang, 2017)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

(2) Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan biasa.

(3) Terhadap putusan demikian itu tidak dapat dimohonkan banding.

(4) Dalam usaha mendamaikan kedua usaha mendamaikan kedua belah pihak, diperlukan bantuan seorang juru bahasa, maka untuk itu diturut peraturan pasal berikut.<sup>34</sup>

Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melihat pentingnya mediasi terintegrasi di pengadilan. Bertolak dari pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg MA memodifikasi mediasi kearah memaksa. Berangkat dari pemahaman demikian maka MA menerbitkan surat edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA). Pertama sekali MA menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai. Tujuan diterbitkan SEMA ini adalah membatasi perkara secara substantive dan procedural. Maka dari itu sangat ditekankan bahwa mediasi bisa meminimalisir penumpukan perkara di pengadilan pada tingkat pertama.

Barangkali belakangan MA menyadari SEMA Nomor 1 Tahun 2002 sama sekali tidak berdaya dan tidak efektif sebagai landasan hukum

<sup>34</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Kemufakatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendamaikan para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tidak jauh berbeda dengan ketentuan pasal 132 HIR/ 154 R.Bg. hanya memberi peran kecil kepada hakim untuk mendamaikan pada satu segi, serta tidak memiliki kewenangan penuh untuk memaksa para pihak melakukan penyelesaian lebih dahulu melalui proses perdamaian. Tidak terlalu lama keberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 ini kemudian disempurnakan oleh MA pada tanggal 11 September 2003 dengan menggantikannya dengan Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>35</sup>

Setelah beberapa tahun keberlakuan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang belum menampakkan hasil yang signifikan, sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mengatasi penumpukan perkara dan keefektifan mediasi dengan cepat, murah, serta memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan.<sup>36</sup> Mahkamah Agung kemudian menyempurnakan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 untuk mengisi kekosongan hukum pengaturan kelembagaan dan pendayagunaan mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan.

Cukup lama eksistensi PERMA No 1 Tahun 2008 kurang lebih delapan tahun, namun belum menampakkan hasil yang signifikan. Efektivitas dari perma tersebut masih diragukan, sehingga pada Tahun 2016 tepatnya tanggal 2 Februari Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Mediasi merupakan bagian

<sup>35</sup> Rahmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm.30

<sup>36</sup> Konsideran butir a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.



dari hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TEORITIS MEDIASI DALAM HUKUM ISLAM

### A. Pengertian Mediasi

Berbicara tentang pengertian mediasi jika kita pandang dengan menggunakan kaca mata hukum, maka pengertian mediasi selalu menimbulkan perbedaan pendapat khususnya para praktisi hukum dan sarjanawan hukum, baik hukum positif maupun hukum islam yang masing-masing memberikan pengertian sesuai sudut pandangnya.<sup>37</sup>

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi akhir-akhir ini. Para ilmuwan berusaha mengungkap secara jelas makna mediasi dalam berbagai literature ilmiah melalui riset dan studi akademik. Namun, istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan ibedakan dari proses penambilan keputusan lainnya.<sup>38</sup>

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna dari arti kata tersebut diatas menunjukkan kepada peran mediator sebagai pihak ketiga yang berusaha menengahi permasalahan yang tengah dihadapi oleh dua pihak. Makna dari kata berada ditengah menunjukkan bahwa posisi mediator ialah netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan. Mediator dituntut mampu

<sup>37</sup> Amrina Nurmaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.60

<sup>38</sup> Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 2006), hlm.119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil sehingga menumbuhkan kepercayaan dari diri para pihak yang bersengketa.<sup>39</sup>

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa sebagai penasehat. Pengertian mediasi dalam KBBI sendiri mempunyai tiga unsur penting; Pertama, mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang terjadi dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bersifat sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.<sup>40</sup>

Dalam bahasa Inggris mediasi disebut dengan *mediation* yang artinya perantara. Secara istilah mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral (mediator) yang tidak memiliki kewenangan memutus.<sup>41</sup>

Pengertian mediasi menurut Moore sebagaimana dikutip oleh Fatahillah A.Syukur, yaitu:

*The intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who as limited or no authoritative decision-making power, who assist the involved parties to voluntary reach a mutually acceptable settlement of the issues in dispute.* (Intervensi pihak ketiga yang diterima para pihak dalam

<sup>39</sup> Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hlm.2

<sup>40</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm.569

<sup>41</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan kemufakatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.12

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah proses negosiasi atau konflik, yang hanya mempunyai kekuasaan yang terbatas atau tidak ada kekuasaan dalam memutus perkara, yang membantu para pihak untuk secara sekarela mencapai penyelesaian yang disepakati).<sup>42</sup>

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.<sup>43</sup>

Mediasi adalah suatu proses untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan salah satu alternative dan cara penyelesaian suatu persengketaan dimana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator dengan maksud untuk memperoleh hasil yang adil dan diterima oleh pihak yang bersengketa.<sup>44</sup>

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>45</sup>

## B. Dasar Hukum Mediasi

Pada umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antar para pihak akan

<sup>42</sup> Fatahillah A Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm.21

<sup>43</sup> Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hlm.201

<sup>44</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm.322

<sup>45</sup> Pasal 1 butir 1 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan merendahkan biaya. Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan silaturahmi. Islam mendorong intervensi aktif, khususnya diantara sesama muslim. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9-10:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:“(9.) dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. (10.) orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (Q.S Al-Hujurat: 9-10).<sup>46</sup>

Bagi sebagian kalangan, ayat ini telah dijadikan legitimasi untuk penggunaan kekerasan dalam Islam, dan kemudian menyangkal hipotesis orang yang cinta damai. Padahal esensi ayat ini mendukung konsep mediasi atau arbitrase dalam penyelesaian sengketa secara fair dengan intervensi pihak

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit* , hlm.846

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketiga. Misi Islam dalam ayat ini adalah menghindari agresi, dan setiap muslim wajib menyelesaikan konflik secara damai. Mereka mesti melakukan rekonsiliasi dengan setiap pihak, karena rekonsiliasi/ perdamaian pemufakatan adalah jalan terbaik penyelesaian konflik. Tertuang juga dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 114:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

Artinya:“(114.) Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (Qs. An-Nisa': 114)<sup>47</sup>

Secara historis, penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dalam praktek hukum Islam. Mediasi sebenarnya adalah istilah baru yang di dalam Islam disebut dengan tahkim. Praktek penyelesaian sengketa melalui mediasi (tahkim) juga telah disebutkan dalam A-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

Artinya:“(35.) Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm.140

*Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS.An-Nisa’: 35).<sup>48</sup>*

Sebab turunnya surat al-Nisa ayat 35 di atas masih berkaitan dengan ayat sebelumnya (Qs An-Nisa(4): 34) yang menerangkan tentang perselisihan antara suami dan istri. Diwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari Hasan bahwa pada suatu waktu datanglah seorang wanita menghadap Rasulullah untuk mengadu masalahnya, bahwa mukanya ditampar oleh suaminya. Rasulullah Saw bersabda: “Suamimu itu harus diqishah (dibalas)”. Sehubungan dengan sabda itu, maka turunlah ayat 34 dan 35 yang dengan tegas memberikan ketentuan, bahwa bagi laki-laki ada hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Setelah mendengar keterangan ayat ini, wanita itu pulang dengan tidak menuntut qishah terhadap suaminya yang telah menampar mukanya.

Diriwayatkan pula oleh Ibn Mardawaih dan Ali ibn Abi Thalib bahwa suatu waktu datang seorang laki-laki dari kalangan sahabat anshar menghadap Rasulullah bersama istrinya. Istrinya mengadu kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah suamiku ini telah memukul mukaku seingga terdapat bekas luka”. Rasulullah bersabda: “Suamimu tidak ada hak untuk melakukan demikian, dia harus diqishash”. Sehubungan dengan itu maka diturunkanlah ayat 34 dan 35 dari surat al-Nisa sebagai ketegasan hukum, bahwa seorang suami berhak

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm.123

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendidik istrinya. Dengan demikian hukum qishash yang hendak dijatuhkan Rasulullah menjadi gugur, tidak dilaksanakan.<sup>49</sup>

Adapun Ishlah yang disabdakan oleh nabi Muhammad Saw adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا مِرْوَانُ -يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ بَلَالٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ -شَكَ أَبُو دَاوُدَ- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ -زَادَ أَحْمَدُ- إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا". وَزَادَ سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ"

Artinya: *Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Perdamaian antara kaum muslim dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram dan perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal."*

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud kitab Sunan Abi Daud no 4919.<sup>50</sup> Yang Artinya: Dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah kalian ingin aku beritahukan sesuatu yang lebih utama derajatnya daripada puasa, shalat, dan sedekah?" Para sahabat berkata, "Ya, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, mendamaikan orang yang berselisih Rusaknya hubungan orang yang berselisih adalah pemangkas agama.

Kesimpulan dari ayat diatas adalah Islam menghindari agresi dan tindakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Islam menawarkan pendekatan damai dan non kekerasan, melalui identifikasi sejumlah problema dan akar penyebab terjadinya konflik.

<sup>49</sup>A. Mu djab Mahlmi, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 223-224

<sup>50</sup>Imam Abu Daud al-sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Bairut: Maktabah al-Dirasah, 1988), hlm. 890



### C. Prosedur Mediasi

Prosedur adalah ketentuan-ketentuan tentang tahapan dan tata cara atau langkah-langkah melaksanakan atau menyelenggarakan sesuatu.<sup>51</sup> Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 mengatur tahapan dan tata cara penggunaan mediasi dalam tiga konteks. Konteks pertama, penggunaan mediasi sebagai penguatan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR dan 154 R.Bg. Konteks kedua, penggunaan mediasi setelah upaya mediasi awal gagal dan perkara telah memasuki tahap pemeriksaan oleh hakim. Konteks ketiga, penggunaan hasil mediasi diluar pengadilan oleh hakim.

Berhasil atau tidaknya mediasi bisa dilihat dari proses atau tahapan dari mediasi. Apabila proses mediasi dilaksanakan dengan hasil yang didapatkan tentu akan baik ataupun sebaliknya apabila mediasi dilaksanakan dengan tidak baik atau tidak sungguh-sungguh maka hasil yang didapatkan tentu tidak akan maksimal atau bahkan gagal. Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.<sup>52</sup> Untuk itu penulis kemukakan tahapan-tahapan mediasi sebagai berikut:

<sup>51</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.164

<sup>52</sup> Syahrizal Abbas, hlm.37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Tahap Pra Mediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap pramediasi merupakan tahap amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, focus pada masa depan, mengkoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.<sup>53</sup>

Tahapan yang dilakukan pertama sekali yaitu penggugat mendaftarkan gugatannya kepada kepaniteraan Pengadilan Agama. Adapun rincian tahapan pra mediasi sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis pemeriksa perkara cerai gugat tersebut dalam sebuah surat penunjukkan majelis.
- b. Kemudian apabila pada sidang pertama penggugat dan tergugat datang, maka hakim Pengadilan Agama mewajibkan untuk menempuh mediasi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 (1) Pada hari sidang

<sup>53</sup> Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, Peace Skills. *Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), hlm.63-67

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.<sup>54</sup>

- c. Kemudian hakim ketua menjelaskan kepada penggugat maupun tergugat tentang prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.
- d. Para pihak dalam hal ini penggugat atau tergugat diberikan waktu paling lama 2 (dua) hari dalam memilih mediator.<sup>55</sup>
- e. Apabila para pihak tidak dapat memilih mediator yang telah terdaftar di pengadilan tersebut dalam jangka waktu dua hari seperti yang tercantum pada Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 maka hakim ketua mejelis pemeriksa perkara menunjuk hakim mediator baik yang mempunyai sertifikat sebagai mediator atau pegawai pengadilan.<sup>56</sup>

#### 2. Tahapan Proses Mediasi

Tahapan pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi.<sup>57</sup>

Langkah-langkah proses mediasi sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan mediasi, para pihak wajib menghadirinya dengan itikad baik. Para pihak dapat dikatakan tidak beritikad baik apabila para pihak telah dipanggil 2 kali secara patut dan tidak menghadiri

<sup>54</sup> Pasal 17 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>55</sup> Pasal 20 Ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan

<sup>56</sup> Pasal 20 Ayat 3 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>57</sup> Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hlm.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mediasi atau menghadiri mediasi dalam pertemuan pertama dan pertemuan selanjutnya tidak datang.<sup>58</sup>

- b. Mediator menyiapkan pertemuan mediasi kepada para pihak untuk berdialog. Proses mediasi ini dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak mediator ditunjuk atau dipilih para pihak dan telah disepakati. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari terhitung sejak habisnya jangka waktu mediasi 30 hari tersebut.
- c. Dalam mendalami permasalahan yang dihadapi para pihak mediator dapat melibatkan tenaga ahli atau tokoh masyarakat tertentu sebagaimana tertuang dalam Paal 26 (1) Atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- d. Mediator dalam upaya melakukan perdamaian juga bias menggunakan kaukus yaitu pertemuan dengan salah satu pihak.
- e. Setelah ditentukannya tanggal dan hari untuk dilaksanakan mediasi, maka hakim mediator memanggil para pihak untuk melakukan mediasi di gedung Pengadilan Agama atau ditempat lain sesuai kesepakatan para pihak yang dibuat di awal. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita pengganti pengadilan agama.
- f. Dalam pertemuan pertama mediasi, mediator memberikan sambutan yang berupa penjelasan yang mengenai peran dan fungsinya sebagai mediator, untung rugi melaksanakan mediasi, meyakinkan para pihak yang berperkara untuk melaksanakan mediasi dengan baik. Menyusun

<sup>58</sup> Pasal 7 Ayat 2 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan dasar mengenai aturan tahapan, menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berhak untuk menentukan keputusan, memberikan kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses.

- g. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan yang dialaminya masing-masing para pihak diberi waktu yang sama.
- h. Mengidentifikasi masalah oleh mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kehendaknya yang dituangkan dalam butir-butir kesepakatan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan bantuan mediator serta ditanda tangani oleh para pihak dan mediator.<sup>59</sup> Kesepakatan tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a.) Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
  - b.) Merugikan pihak ketiga; atau
  - c.) Tidak dapat dilaksanakan.
- i. Apabila kesepakatan yang dibuat hanya disepakati sebagiannya saja, maka tetap ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan sebagian dikuatkan dengan akta perdamaian. Pengajuan gugatan dapat diajukan kembali terhadap hal-hal yang tidak disepakati.
- j. Apabila mediasi tidak tercapai kesepakatan maka mediator wajib membuat laporan kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal:

<sup>59</sup> Pasal 27 Ayat 3 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a.) Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3);
- b.) Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.
- k. Mediasi berakhir apabila terjadi kesepakatan dan berakhir dengan ketidak sepakatan atau lanjut kepada sidang pengadilan.

#### 3. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain disini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.<sup>60</sup>

#### D. Mediasi menurut Islam

Dalam Islam istilah mediasi dikenal dengan istilah-sulh penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Sulh memberikan kesempatan para pihak untuk

<sup>60</sup> Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hlm. 53-54



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti.<sup>61</sup> Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa dapat diakhiri.

Keberadaan al-sulh sebagai upaya damai diterangkan dalam al-quran surah An-Nisa ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ  
بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا  
عَظِيمًا

Artinya: “(114.) Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”<sup>62</sup>

Dari surah An-Nisa' ayat 114 diatas menggambarkan bahwa kebaikan yang harus dilakukan tidak serta merta harus diungkapkan dengan bahasa lisan yang keras serta serta didengar banyak orang, maka ayat ini menganjurkan untuk mengajak berbuat kebaikan pada seseorang dengan cara berbisik-bisik atau secara rahasia. Di akhir ayat ini disebutkan bahwa atau mendamaikan diantara manusia, ayat ini menganjurkan perdamaian bagi manusia yang mengalami perselisihan. Menurut tafsir Al-Azhar hendaklah mendamaikan itu dibutuhkan satu orang yang berselisih, hendaklah pula hal ini dilakukan secara rahasia karena untuk menutup kemungkinan diketahui banyak orang apabila, diketahui khalayak ramai kedua belah pihak yang bersekutu akan berkeras diri tidak mau mengalah dan tetap pada pendirian masing-masing, sehingga

<sup>61</sup> Syahril Abbas, *Ibid*, hlm.159

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, hlm. 77

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemungkinan untuk damai kecil.<sup>63</sup> Ayat ini merupakan gambaran umum dari upaya damai yang terjadi karena perselisihan antar manusia.

Kemudian dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 128 Allah menerangkan tentang konsep Al-Sulh dalam perkara perceraian.

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: “(128.) Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>64</sup>

Ayat diatas merupakan suatu fatwa khusus mengenai pergaulan dalam rumah tangga suami dan istri. Dari ayat di atas memberi pemahaman bahwa seorang istri apabila merasa takut atau cemas melihat sikap suaminya terhadap dirinya, apakah masih cinta atau tidak ataukah sudah berpaling kepada yang lain. Sehingga menurut pertimbangan perempuan tersebut mengambil inisiatif untuk terlebih dahulu menghubungi suaminya dengan cara yang baik dan hal ini diperbolehkan dan bukan merupakan suatu larangan, supaya mendapatkan jalan yang damai.

<sup>63</sup> Abdul Malik Abdul karim Amrullah, *Tafsir Al-Ahzal*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), Juz 4-6, hlm.275

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm.78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Boleh lah atas usul istri diadakan pertemuan berdua ataupun disaksikan oleh keluarga guna mencari sebab-sebab perubahan sikap diantara mereka. Intinya bukan suatu larangan apabila inisiatif damai diajukan dari pihak istri, lalu kelanjutan ayat ini mengatakan dan perdamaian adalah jalan yak baik. Berarti bukan saja tidak berhalangan jika si istri yang mulai mengambil langkah, bahkan dipujikan. Dan kalimat itu terkandung lagi rahasia yang lain, yaitu sebelum mengambil langkah ini hendaklah si istri berpikir masak-masak jangan hanya menurut perasaan, bukan perdamaian yang akan dicapai melainkan perselisihan.<sup>65</sup> Pada ujung ayat ini menyuruh untuk berbuat kebaikan kepada seluruh manusia sehingga perselisihan tidak terjadi. Pada masa Rasulullah SAW praktik Al-Suhl dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan. Tujuannya adalah agar para pihak menemukan kepuasan atas jalan keluar yang mereka pilih.

Bentuk perdamaian antara suami istri yang berselisih terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 35. Ayat ini lebih dekat pengertian dan penerapannya terhadap konsep mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

<sup>65</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Op. Cit.*, hlm.304

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: “(35.) *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>66</sup>

Ayat ini menjelaskan mengenai apabila terjadi persengketaan antara suami dan istri maka kirimlah dua orang hakam, satu dari hakam pihak suami dan satu hakam dari pihak istri, kedua hakam tersebut berfugsi sebagai juru damai. Kedua hakam tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak, terlebih dahulu, kedua hakam tersebut mencari sebab-sebab terjadinya persengketaan dan mencari jalan keluar yang terbaik bagi suami istri tersebut.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang hakam adalah, baliqh, berakal, adil, muslim. Dalam surah An-Nisa ayat 35 di atas hakam tidak disyariatkan dari keluarga suami atau istri, namun hanya bersifat anjuran. Bila ada orang lain yang lebih mengerti dan memahami permasalahan ini maka orang tersebut bias menjadi hakam bagi suami istri yang sedang mengalami persengketaan.

Dalam tafsir Ibnu Katsir memahami hakam sebagai seorang penengah yang mengusahakan perdamaian, maka dari itu menurut penulis hakam dalam surat An-Nisa ayat 35 sama halnya dengan mediator yang ada dipengadilan agama. Hakam berusaha mendamaikan serta dapat memberikan kesimpulan apakah perkawinan antara suami istri yang berselisih dapat dipertahankan atau apabila dengan dipertahankan banyak mengandung mudorat maka lebih baik

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipisahkan. Serta hakam juga memberikan laporan apakah mediasi tersebut gagal atau berhasil, hal ini jelas sama dengan peran dan fungsi mediator.

Islam dalam mengadili perselisihan antara suami istri adalah harus menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga senantiasa selalu mengadili konflik, namun itu adalah hal wajar. Hendaknya antara suami istri senantiasa mendekatkan diri pada Allah sehingga selalu diberikan petunjuk atas permasalahan yang dihadapi. Namun apabila perselisihan terjadi hendaklah mengambil jalan damai. Upaya perdamaian hendaknya tidak melanggar syariat sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya;

Dari Amir bin Aufal Muzani *radiyallahu'anh* bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Perdamaian itu halal diantara kaum muslimin, kecuali jika perdamaian yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslimin wajib berperang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram.”<sup>67</sup>

<sup>67</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm.371

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka terdapat beberapa kesimpulannya sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mengenai tahapan pramediasi pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi. Dilakukannya mediasi berdasarkan PERMA ini dapat diperoleh pertama terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari kerja menjadi 30 hari kerja terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau didampingi kuasa hukum, terkecuali ada alasan-alasan yang sah. Ketiga, yang paling baru adalah adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Tahapan Pramediasi dalam Pemeriksaan Perkara Perceraian Al-Qur'an mengatur proses penyelesaian sengketa ini dengan pengangkatan hakam dilakukan dari unsur keluarga baik di dalam persidangan atau di luar persidangan. Kemudian berkembang praktek penyelesaian sengketa itu melalui seorang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disebut dengan mediator melalui suatu proses mediasi di pengadilan. Terbukannya ruang untuk mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama sejalan dengan ajuran al-Qura'an sebagaimana dalam Surah al-Nisa' di atas. Al-Qur'an memerintahkan untuk menyelesaikan perselisihan dengan upaya perdamaian dan membenarkan keberadaan pihak ketiga sebagai penengah yang dianggap mampu dan cakap serta dapat membantu para pihak yang berselisih menemukan penyelesaian untuk permasalahan yang tengah dihadapi.

**B. Saran**

Dari keseluruhan pembahasan penelitian ini ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan :

1. Adanya pembaharuan terhadap PERMA tentang mediasi ini diharapkan mediasi yang dilakukan di pengadilan dapat berjalan dengan lancar dan kasus perceraian yang terjadi bisa diatasi agar perceraian tersebut tidak jadi terlaksana.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk dilakukan kajian penelitian selanjutnya mengenai mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.
3. Teruntuk para pembaca, penulis sadar pada penyulisan penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena mungkin masih ada beberapa ilmu atau pembahasan yang mungkin masih mengandung kekeliruan, penulis mohon agar dapat diberikan saran dan nasehat kepada diri penulis sehingga skripsi ini bisa dipertanggung jawabkan dengan semestinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- A. Mu djab Mahlmi, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung, cet I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Abdul Malik Abdul karim Amrullah, *Tafsir Al-Ahzal*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), Juz 4-6
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. Ke-1
- Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Fatahillah A Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2012)
- Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993)
- Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 2006)
- Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- Imam Abu Daud al-sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Bairut: Maktabah al-Dirasah, 1988)
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)
- Luqman Santoso AZ, *Negara Hukum dan Demokrasi : Paag Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Nadi Offset, 2016)
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1994)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

M.Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kembali dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Mahkamah Agung, *Profil Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI)

Muhammad sa'ad al-Yubi, *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyah*

Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009)

Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009)

Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2014)

Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, *Peace Skills. Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006)

Soesolo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007)

Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981)

Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Kemufakatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988)

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010)



Dede Anggraini Elda, *Efektifitas PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang*, (UIN Raden Fatah Palembang, 2017)

Konsideran butir a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Moehhammad Moein, *Kedudukan Kuasa dan Peran Hakim Dalam Memberi Putusan* (Penelitian, Pusat Penelitian IAIN Ar – Raniry Darusslam Tahun 1985)

Muhammad Saefullah, (2015). *“Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama di Jawa Tengah”*. AHKAM, Vol. 25 No.2

Pendapat Wakil Ketua MA dalam acara Asia Pacific Mediation Forum Ke-7, Lombok (2016)

Septi Wulan Sari, *Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, volume 5 Nomor 1, Juli 2017*, hlm 1, di akses tanggal 16 oktober 2020 pada pukul 22:04

Rahadi Wasi Bintoro, *Kajian Antologis Lembaga Mediasi di Pengadilan*. Jurnal Yuridika, Vol. 31 No. 1 (2016)

## Peraturan Perundang-undangan dan putusan

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24A., dalam Redaksi Interaksara, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat, (Tangerang: Interaksara)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN**”, yang ditulis oleh:

Nama : **YUNIA NURISMAN**  
NIM : 11721200621  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2021

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Nurnasrina, SE., M.Si.**

Sekretaris  
**Musrifah, SH., MH.**

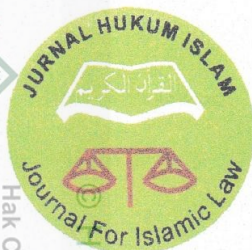
Penguji I  
**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH.**

Penguji II  
**Dr. Mahmuzar, M.Hum.**

Mengetahui :  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : YUNIA NURISMAN  
**NIM** : 11721200621  
**JURUSAN** : HUKUM KELUARGA(AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)  
**JUDUL** : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN

**Pembimbing: Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 Juni 2021

*m* Pimpinan Redaksi



**M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
**NIP. 19880480 201903 1 010**

UIN SUSKA RIAU



## BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Penulis bernama **Yunia Nurisman**, dilahirkan di Kota Padang, pada tanggal 22 Juni 1999. Ayahanda bernama Tasman Ar dan Ibunda bernama Nursida. Penulis anak terakhir dari tiga bersaudara. Jenjang pendidikan dimulai dari pendidikan di TK Ikhlas Koto Tangah Ikur Koto tahun 2004-2005, dan penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 02 Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2005-2011, dan penulis melanjutkan pendidikan di MTs Negeri Sungai Geringging dari tahun 2011-2014, dan melanjutkan pendidikan di MAN 3 Kota Padang dari tahun 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN”** dibawah bimbingan bapak DR. Zulfahmi Bustami, M.Ag dan pada tanggal 15 April 2021 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasyah dan dinyatakan lulus dan menyandang gelas Sarjana Hukum (SH).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.